



The Implementation of Good Governance in Regional MSME Development: A Qualitative Study at the PMK Office of Central Lampung Regency

Tia Marlinda Sari¹, Putri Rahmaini²
Universitas Muhammadiyah Lampung
Bandar Lampung, Indonesia

Email correspondence: tiamarlinda22@gmail.com

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the implementation of good governance principles in MSME development services at the Cooperative and SME Office of Central Lampung Regency, highlighting the dimensions of transparency, accountability, and participation in public service practices.

Design/Methodology/Approach: This study employs a qualitative approach through in-depth interviews with agency officials and MSME actors, observation of service processes, and analysis of MSME development policy documents. Data were analyzed thematically to identify patterns of governance principle implementation in local-level service practices.

Findings: The results indicate that good governance principles in MSME development services have been adopted within an administrative procedural framework, particularly in aspects of information transparency and reporting accountability. However, implementation remains predominantly procedural and has not fully produced participatory and responsive governance that addresses the actual needs of MSME actors. MSME participation is still limited to the program implementation stage, while deliberative spaces in policy planning and evaluation remain relatively constrained. These findings suggest that good governance practices at the local level tend to develop in the form of procedural compliance governance, a condition in which governance principles are formally adopted but not yet fully internalized in substantive service practices.

Practical Implications: Theoretically, this study contributes to governance scholarship by demonstrating that the implementation of good governance in local government contexts is determined not only by policy design, but also by institutional capacity, bureaucratic culture, and the relational patterns between government and business actors as service users.

Originality/Value: The novelty of this study lies in its empirical explanation of how institutional capacity dynamics and local-level service practices shape the character of good governance implementation in MSME development services in Indonesia.

Keywords: Good Governance; Public Services; MSME Development; Institutional Capacity.

Research Type: Research Paper.

Implementasi Good Governance pada Pembinaan UMKM Daerah: Studi Kualitatif di Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah dengan menyoroti dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam praktik pelayanan publik.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan aparatur dinas dan pelaku UMKM, observasi terhadap proses pelayanan, serta analisis dokumen kebijakan pembinaan UMKM. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi prinsip tata kelola dalam praktik pelayanan di tingkat daerah.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada pelayanan pembinaan UMKM telah diadopsi dalam kerangka prosedur administratif, terutama pada aspek transparansi informasi dan akuntabilitas pelaporan. Namun, implementasinya masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola pelayanan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Partisipasi UMKM masih terbatas pada tahap implementasi program, sementara ruang deliberasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *good governance* di tingkat lokal cenderung berkembang dalam bentuk procedural compliance governance, yaitu kondisi ketika prinsip-prinsip tata kelola diadopsi secara formal tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pelayanan yang substantif.

Implikasi Praktis : Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian *governance* dengan menunjukkan bahwa implementasi *good governance* pada konteks pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, budaya birokrasi, dan pola relasi antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai pengguna layanan.

Originalitas/Nilai : Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan empiris mengenai bagaimana dinamika kapasitas institusional dan praktik pelayanan di tingkat lokal membentuk karakter implementasi *good governance* dalam pelayanan pembinaan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci : *Good Governance*; Pelayanan Publik; Pembinaan UMKM; Kelembagaan.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Good governance dipahami sebagai paradigma utama dalam tata kelola administrasi publik modern yang menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pelayanan publik. (Armansyah 2024). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak responsif, birokratis, dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat (Riwukore, Habaora, and Terttiaavini 2022). Dalam literatur administrasi publik, good governance dipahami bukan hanya sebagai tata kelola yang efisien, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dan perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan (Suriadi 2025). Implementasi prinsip-prinsip good governance menjadi semakin penting dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pelayanan publik, termasuk kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Ulfa and Frinaldi 2025).

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip good governance dalam praktik pelayanan publik tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan secara normatif. Berbagai program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sering kali menghadapi kendala dalam tahap implementasi, terutama pada tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi benar-benar diterapkan dalam praktik birokrasi sehari-hari. Dalam konteks pembinaan UMKM, problem ini menjadi semakin penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pelayanan yang dijalankan oleh institusi pemerintah daerah.

UMKM menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional maupun daerah, terutama sebagai penyedia lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta penopang ketahanan ekonomi masyarakat (Hidayat, Lesmana, and Latifah 2022). Berbagai kajian ekonomi pembangunan menegaskan bahwa keberhasilan penguatan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor modal dan pasar, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kebijakan publik yang mengaturnya (Arifa et al. 2025). Pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pelayanan pembinaan UMKM yang mencakup pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan (Sumadi and Prathama 2021). Mutu pelayanan pembinaan UMKM sangat ditentukan oleh tingkat konsistensi penerapan prinsip good governance pada setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Tanpa tata kelola

yang baik, kebijakan pembinaan UMKM berpotensi bersifat administratif semata dan kurang berdampak nyata bagi pelaku usaha (Saputra and Purna 2024).

Perdebatan akademik mengenai good governance dalam pelayanan publik menunjukkan adanya dua kecenderungan utama. Sebagian Penelitian berkesimpulan memandang good governance sebagai instrumen normatif yang ideal dan bersifat universal, sehingga penerapannya diyakini mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik secara otomatis (Wilujeng 2025). Pandangan ini banyak ditemukan dalam literatur lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP yang menekankan standardisasi prinsip tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, sejumlah akademisi kritis menilai bahwa penerapan good governance sering kali bersifat simbolik dan prosedural, tanpa menyentuh praktik substantif di tingkat implementasi (Suriadi 2025). Pendekatan ini menyoroti adanya kesenjangan antara konsep dan realitas, terutama di tingkat pemerintah daerah, di mana budaya birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan kepentingan politik lokal memengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance.

Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan ilmiah yang menarik mengenai mengapa prinsip-prinsip good governance yang secara konseptual dianggap mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak selalu menghasilkan dampak yang sama dalam praktik di berbagai daerah. Dalam beberapa kasus, penerapan prinsip good governance diklaim berhasil meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik, namun di sisi lain terdapat pula temuan empiris yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut hanya bersifat administratif dan belum menghasilkan perubahan substantif dalam praktik pelayanan. Kondisi ini menimbulkan fenomena ilmiah yang membingungkan (*scientific puzzle*), yaitu ketidaksesuaian antara ekspektasi teoritik good governance dengan realitas implementasinya di tingkat lokal.

Dalam konteks pelayanan publik, good governance tidak dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga sebagai proses interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat (Kamindang et al. 2025). Literatur administrasi publik kontemporer menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas horizontal sebagai elemen kunci tata kelola yang demokratis (Gaol, Santoso, and Prasetyo 2024). Pelayanan pembinaan UMKM menjadi arena strategis untuk menguji sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diinternalisasi dalam praktik birokrasi daerah. Pelaku UMKM bukan hanya objek kebijakan, melainkan subjek yang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi yang beragam (Budiarto et al. 2018). Oleh karena itu, pendekatan good governance dalam pembinaan UMKM menuntut adanya mekanisme dialog, keterbukaan informasi, serta evaluasi berbasis umpan balik dari pelaku usaha sebagai pengguna layanan publik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural (Elazhari and Siregar 2025). Studi-studi di jurnal nasional terakreditasi mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sering kali terhambat oleh sistem birokrasi yang hierarkis dan kurang adaptif (Agma 2025). Penelitian lain juga menyoroti bahwa di negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi good governance cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan (Saggaf, Said, and Saggaf 2018). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta terbatasnya efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan good governance sangat ditentukan oleh konteks lokal dan praktik institusional di tingkat implementasi, bukan semata oleh desain kebijakan di atas kertas.

Dinas Koperasi dan UKM sebagai institusi teknis di tingkat daerah memegang peran sentral dalam menerjemahkan kebijakan pembinaan UMKM ke dalam praktik pelayanan public (Putri 2017). Fungsi pembinaan yang dijalankan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang dianut oleh organisasi tersebut. Dalam perspektif good governance, dinas ini dituntut untuk menjalankan pelayanan yang transparan dalam penyaluran program, akuntabel dalam penggunaan anggaran, partisipatif dalam perumusan kebijakan, serta responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa capaian tersebut tidak selalu mudah diwujudkan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pelayanan.

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang relatif besar menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pembinaan sektor ini. UMKM di wilayah ini didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga. Kondisi sosial ekonomi tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran (Indah 2024). Fakta sosial di lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap program pembinaan yang disediakan pemerintah, serta perbedaan persepsi mengenai kualitas pelayanan yang diterima. Fenomena ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara kerangka teoritik good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan realitas implementasi pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah. Secara teoritis, penerapan prinsip-prinsip tersebut seharusnya mampu

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat efektivitas program pembinaan UMKM. Namun dalam praktiknya, berbagai kendala seperti keterbatasan informasi, prosedur birokrasi yang kompleks, serta rendahnya partisipasi pelaku usaha menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap teoretik antara asumsi normatif good governance dengan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal, sehingga diperlukan kajian empiris yang mampu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan publik.

Sejumlah studi di Indonesia telah membahas good governance dalam pelayanan publik, namun sebagian besar berfokus pada sektor administrasi kependudukan, perizinan, atau pelayanan kesehatan (Hutagalung 2021). Kajian yang secara khusus menyoroti pelayanan pembinaan UMKM masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman aktor dan proses implementasi kebijakan. Penelitian yang ada cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan atau kinerja pelayanan, sehingga kurang menggali dinamika internal birokrasi dan interaksi sosial antara aparatur dan pelaku UMKM. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian kualitatif yang mampu memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam mengenai praktik good governance dalam pembinaan UMKM.

Pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk mengkaji implementasi good governance karena mampu menangkap kompleksitas proses, makna, dan persepsi aktor yang terlibat. Dalam kajian tata kelola publik, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip normatif diterjemahkan dalam praktik sehari-hari birokrasi. Studi kualitatif juga memberikan ruang untuk mengungkap faktor-faktor informal seperti budaya organisasi, pola komunikasi, dan relasi kekuasaan yang sering kali luput dari analisis kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menilai sejauh mana prinsip good governance diterapkan, tetapi juga bagaimana dan mengapa prinsip tersebut dijalankan atau justru diabaikan dalam konteks pelayanan pembinaan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah.

Literatur lain tentang governance menekankan pentingnya konteks lokal dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public (Simatupang and Akib 2011). Pendekatan one-size-fits-all dalam penerapan good governance dinilai kurang efektif karena mengabaikan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan daerah (Astuti 2025). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi memberikan ruang inovasi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, kajian empiris berbasis studi kasus daerah menjadi penting untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan rekomendasi

kebijakan yang kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus akademik dengan menghadirkan bukti empiris mengenai praktik good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah.

Fakta sosial menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali menghadapi kendala dalam mengakses program pembinaan yang disediakan pemerintah, baik karena keterbatasan informasi, prosedur yang kompleks, maupun persepsi kurangnya transparansi (HARDI and ZAHARMAN 2018). Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan pembinaan dan menghambat pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Dalam perspektif good governance, persoalan tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam pelayanan publik. Kajian ini memandang bahwa pelayanan pembinaan UMKM bukan sekadar proses administratif, melainkan arena relasi antara negara dan warga yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Gap riset dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian kualitatif yang secara spesifik mengkaji penerapan prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan UMKM sebagai objek kebijakan ekonomi, bukan sebagai subjek dalam kajian tata kelola pelayanan publik. Selain itu, belum banyak studi yang menggali persepsi aparatur dan pelaku UMKM secara bersamaan untuk memahami dinamika implementasi good governance dari kedua sisi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjembatani analisis kebijakan dan realitas praktik pelayanan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana praktik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan dalam proses pelayanan pembinaan UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik dan governance dengan memperkaya pemahaman mengenai implementasi good governance di tingkat lokal. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan UMKM. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan praktik pelayanan agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan kebijakan yang signifikan dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan paparan konseptual, empiris, dan gap riset tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan utama mengenai bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. Rumusan masalah ini difokuskan pada upaya memahami praktik implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelayanan pembinaan UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Rumusan masalah ini menjadi dasar analisis untuk mengungkap dinamika tata kelola pelayanan publik di tingkat daerah secara mendalam dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan dinamika implementasi kebijakan publik berdasarkan perspektif aktor yang terlibat secara langsung. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual dan holistik, khususnya dalam kajian tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang tidak dapat diukur hanya dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menekankan bahwa penelitian kualitatif efektif untuk memahami praktik sosial dan kebijakan dalam konteks nyata (Creswell and Poth 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi utama studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu Juni hingga September 2025, sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk mengamati dinamika pelayanan pembinaan UMKM secara lebih komprehensif dalam konteks kegiatan program yang sedang berjalan.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 5 aparatur Dinas Koperasi dan UKM yang terlibat langsung dalam program pembinaan UMKM serta 7 pelaku UMKM yang pernah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh dinas tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu: (1) aparatur yang memiliki tugas dan pengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan UMKM; (2) pelaku UMKM yang aktif mengikuti kegiatan pelatihan atau pendampingan yang diselenggarakan oleh dinas; serta (3) informan yang bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap pelayanan pembinaan UMKM.. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap

peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi, dan dokumen kebijakan pembinaan UMKM. Penggunaan beragam sumber data ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas temuan melalui penerapan teknik triangulasi, sejalan dengan pandangan Sugiyono yang menegaskan pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek kajian (Sugiyono 2021).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelayanan pembinaan UMKM. Mekanisme analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga tahap interpretasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika implementasi *good governance* secara mendalam. Model analisis ini merujuk pada konsep Miles dan Huberman yang banyak digunakan dalam kajian administrasi publik dan governance karena mampu menjelaskan proses kebijakan secara sistematis dan kontekstual (Miles, Huberman, and Saldana 2014). Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti memiliki peran penting dalam proses interpretasi data. Oleh karena itu, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen utama penelitian yang berupaya memahami fenomena secara objektif melalui interaksi langsung dengan informan dan konteks penelitian. Peneliti tidak memiliki keterlibatan struktural dengan instansi yang diteliti, sehingga posisi peneliti relatif independen dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Kesadaran reflektif (*reflexivity*) ini dilakukan dengan cara menjaga jarak analitis terhadap data, melakukan pencatatan lapangan secara sistematis, serta membandingkan berbagai perspektif informan untuk menghindari bias subjektivitas dalam proses interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pembinaan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah telah diupayakan melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan fasilitasi akses permodalan. Program-program tersebut secara formal merepresentasikan komitmen institusi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik. Dalam perspektif *good governance*, keberadaan program tersebut merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik (Nurhayati 2025). Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* tidak

sepenuhnya berlangsung secara substantif. Sebagian praktik pelayanan masih bersifat administratif dan bergantung pada kebijakan internal institusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga dengan dinamika institusional yang memengaruhi bagaimana program tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dimaknai oleh pelaku UMKM sebagai penerima layanan.

Dalam konteks transparansi, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan akses informasi mengenai program pembinaan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, papan pengumuman, serta koordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan (Andini 2024). Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran birokrasi terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai prasyarat partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Namun, temuan empiris memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi tidak sepenuhnya merata di antara pelaku UMKM. Sebagian informan UMKM mengaku memperoleh informasi program secara tidak langsung melalui jaringan informal. Fenomena ini menunjukkan bahwa transparansi dalam praktik birokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh struktur relasi sosial dan jaringan komunikasi yang berkembang di tingkat lokal. Dengan kata lain, akses terhadap informasi pelayanan publik dalam konteks UMKM sering kali dipengaruhi oleh kedekatan sosial, jaringan komunitas, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses ruang komunikasi birokrasi.

Dari perspektif akuntabilitas, aparaturnya menilai bahwa mekanisme pelaporan program dan pertanggungjawaban anggaran telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Rahmanurrajiid 2008). Akuntabilitas dalam perspektif birokrasi pemerintah cenderung dimaknai sebagai kepatuhan administratif terhadap prosedur dan pelaporan formal kepada otoritas yang lebih tinggi. Namun, hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan dipahami secara berbeda oleh penerima layanan. Bagi pelaku UMKM, akuntabilitas lebih berkaitan dengan dampak nyata program terhadap perkembangan usaha mereka. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas substantif dalam praktik pelayanan publik. Secara sosial-politik, fenomena ini mencerminkan bahwa struktur birokrasi pemerintah masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban vertikal kepada institusi negara dibandingkan dengan pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Aspek partisipasi juga menunjukkan dinamika yang menarik dalam praktik pelayanan pembinaan UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan pelaku UMKM dalam program pembinaan masih terbatas pada keikutsertaan dalam kegiatan yang telah dirancang oleh dinas (Prastika 2016). Pelaku UMKM jarang

dilibatkan dalam proses perencanaan atau evaluasi program pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola relasi antara birokrasi pemerintah dan pelaku UMKM masih bersifat top-down, di mana pemerintah daerah berperan sebagai aktor utama dalam menentukan agenda pembinaan. Dalam perspektif sosial-politik, pola ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pelayanan publik masih terbatas. Partisipasi yang terjadi lebih bersifat konsultatif daripada deliberatif, sehingga pelaku UMKM belum memiliki posisi yang kuat dalam memengaruhi arah kebijakan pembinaan usaha yang mereka terima.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pembinaan UMKM masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan program. Pelatihan dan kegiatan pembinaan yang diberikan oleh dinas dinilai mampu meningkatkan pengetahuan dan motivasi pelaku usaha pada tahap awal (Lucianda 2020). Namun demikian, dampak jangka panjang dari program tersebut belum sepenuhnya terlihat karena keterbatasan pendampingan lanjutan setelah pelatihan. Dari perspektif tata kelola kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa program pembinaan UMKM masih berorientasi pada kegiatan jangka pendek yang bersifat proyek administratif. Padahal, pengembangan kapasitas usaha kecil memerlukan pendekatan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan perubahan struktural dalam praktik usaha masyarakat.

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi good governance di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika institusional dan konteks sosial-politik yang melingkupinya. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sering kali telah diadopsi sebagai kerangka normatif dalam kebijakan publik, namun implementasinya di lapangan dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, budaya organisasi, serta relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat (Choirulsyah and Azhar 2024). Dalam konteks pelayanan pembinaan UMKM di Lampung Tengah, prinsip good governance telah menjadi bagian dari kerangka kerja formal pelayanan publik. Namun, implementasi prinsip tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek substantif agar mampu menciptakan hubungan pelayanan publik yang lebih responsif dan partisipatif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan dalam kerangka kebijakan formal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Transparansi dan akuntabilitas administratif relatif telah diupayakan, tetapi partisipasi masyarakat dan efektivitas pelayanan masih memerlukan penguatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan pembinaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh desain program pemerintah, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial-politik antara birokrasi pemerintah dan pelaku usaha sebagai penerima layanan.

Dinamika Kapasitas Institusional dalam Implementasi Good Governance pada Pembinaan UMKM

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal organisasi maupun faktor eksternal di luar institusi. Faktor-faktor tersebut membentuk dinamika implementasi pelayanan publik di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa penerapan good governance belum sepenuhnya optimal meskipun telah didukung oleh regulasi dan program formal. Analisis ini tidak hanya memotret kondisi institusional, tetapi juga relasi sosial yang memengaruhi praktik pelayanan pembinaan UMKM.

Faktor pendukung utama penerapan good governance berasal dari komitmen aparatur dinas dalam menjalankan tugas pelayanan. Aparatur menyadari bahwa pembinaan UMKM merupakan mandat strategis pemerintah daerah. Seorang informan menyampaikan, *"Kami berusaha menjalankan pembinaan sebaik mungkin karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah."* Komitmen ini tercermin dari upaya dinas untuk terus menyelenggarakan program pembinaan meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Faktor ini menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan dan kesadaran institusional memiliki peran penting dalam mendorong praktik good governance (Kharisma 2014).

Dukungan kebijakan daerah dan regulasi nasional juga menjadi faktor pendukung penerapan good governance (Pigome et al. 2024). Keberadaan regulasi terkait UMKM memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pelayanan pembinaan. Aparatur dinas menilai bahwa regulasi tersebut memudahkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat legitimasi program. Namun, regulasi yang bersifat umum sering kali memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal (Margaretha 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan formal perlu diterjemahkan secara kontekstual agar mampu mendukung implementasi good governance secara efektif di tingkat daerah.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan good governance (Saputra and Prasetyani 2025). Jumlah aparatur yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang harus dilayani. Kondisi ini berdampak pada intensitas pendampingan dan keterlibatan UMKM dalam proses pelayanan. Seorang aparatur menyatakan, *"Jumlah UMKM sangat banyak, sementara petugas kami terbatas."* Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan struktural berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan penerapan prinsip good governance secara menyeluruh.

Rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM dalam program pembinaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan pelayanan yang terbentuk antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM masih cenderung bersifat satu arah. Program pembinaan dirancang dan ditentukan oleh institusi pemerintah, sementara pelaku UMKM lebih banyak ditempatkan sebagai penerima manfaat yang mengikuti agenda yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, partisipasi pelaku UMKM lebih bersifat administratif, yaitu hadir sebagai peserta kegiatan, namun belum mencapai tingkat keterlibatan substantif dalam proses perencanaan maupun evaluasi program. Seorang informan UMKM menyampaikan bahwa “kadang kami ikut pelatihan, tapi materinya kurang sesuai dengan kondisi usaha kami,” yang menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program pembinaan dan kebutuhan riil pelaku usaha.

Fenomena tersebut dapat dibaca sebagai indikasi munculnya clientelistic service culture dalam praktik pelayanan pembinaan UMKM. Dalam pola pelayanan seperti ini, pemerintah berperan sebagai penyedia program sekaligus penentu agenda kebijakan, sedangkan masyarakat diposisikan sebagai penerima manfaat yang relatif pasif. Hubungan pelayanan yang bersifat paternalistik tersebut secara tidak langsung membatasi ruang deliberasi bagi pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam menentukan arah program pembinaan yang mereka terima. Akibatnya, prinsip partisipasi dalam good governance belum sepenuhnya terwujud secara substantif, karena interaksi antara negara dan masyarakat masih didominasi oleh logika pelayanan birokratis yang top-down.

Publik tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara struktur kelembagaan, budaya organisasi birokrasi, dan posisi masyarakat sebagai pengguna layanan (Dwiyanto 2021). Partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemauan individu untuk terlibat, tetapi juga oleh sejauh mana institusi pemerintah membuka ruang deliberatif dalam proses kebijakan. Dengan demikian, keterbatasan partisipasi UMKM dalam program pembinaan di Kabupaten Lampung Tengah mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas institusional dalam mengembangkan model pelayanan publik yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM masih berada pada tahap prosedural. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diadopsi dalam kerangka kebijakan formal, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan budaya birokrasi yang cenderung hierarkis (Embang, Saleh, and Jamal 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya memerlukan regulasi dan program formal, tetapi juga transformasi dalam praktik tata kelola birokrasi agar

hubungan antara pemerintah dan pelaku UMKM dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih deliberatif. Dengan demikian, dinamika partisipasi UMKM dalam penelitian ini tidak hanya merefleksikan persoalan operasional program pembinaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur kelembagaan dan budaya pelayanan birokrasi membentuk praktik good governance di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah merefleksikan dinamika yang sering ditemukan dalam praktik tata kelola publik di tingkat lokal, yaitu adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap prinsip tata kelola yang baik dan kapasitas implementasi di tingkat birokrasi. Dalam perspektif governance global, fenomena ini mencerminkan apa yang oleh para ahli tata kelola publik disebut sebagai *normative adoption without substantive transformation*, yaitu kondisi ketika prinsip-prinsip governance telah diadopsi dalam kerangka kebijakan formal, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pelayanan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi good governance tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi atau prosedur administratif, melainkan juga dengan transformasi praktik kelembagaan yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan secara substantif dalam pelayanan publik.

Jika dibandingkan dengan pendekatan *participatory governance*, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam pelayanan pembinaan UMKM masih terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka *participatory governance*, partisipasi idealnya tidak hanya berupa keikutsertaan dalam implementasi program, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan. Keterbatasan ruang partisipasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelayanan publik masih berada dalam pola hubungan birokratis yang relatif hierarkis, sehingga proses deliberasi antara pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal.

Temuan tersebut juga dapat dianalisis melalui perspektif *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menyediakan program pelayanan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu membangun mekanisme kolaboratif dengan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pembinaan UMKM di Lampung Tengah, relasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha masih lebih menyerupai pola pelayanan tradisional, di mana

pemerintah bertindak sebagai penyedia program sementara masyarakat berperan sebagai penerima layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju model collaborative governance masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi kebijakan, mekanisme konsultasi publik, serta keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses perumusan program pembinaan.

Selain itu, dinamika implementasi good governance dalam penelitian ini juga dapat dipahami melalui perspektif street-level bureaucracy, yang menekankan peran aparatur pelaksana di tingkat lapangan dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka ini, aparatur pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang secara langsung menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas organisasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ruang diskresi aparatur menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana prinsip-prinsip good governance diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan. Dengan demikian, implementasi tata kelola yang baik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat makro, tetapi juga oleh kemampuan aparatur di tingkat operasional untuk mengelola keterbatasan institusional dalam pelaksanaan program.

Dalam kerangka governance global, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik good governance di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tidak dapat dipahami sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pembinaan UMKM tidak hanya memerlukan penyempurnaan program atau regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas institusi pemerintah daerah untuk membangun relasi pelayanan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi good governance di tingkat lokal merupakan proses yang bersifat kontekstual dan bertahap. Transformasi dari model pelayanan birokratis menuju tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif memerlukan perubahan tidak hanya pada struktur kebijakan, tetapi juga pada budaya organisasi birokrasi dan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM sangat bergantung pada kemampuan institusi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip governance global dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur governance dengan menunjukkan bahwa implementasi good governance pada konteks pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh dinamika kapasitas institusional dan pola relasi antara negara dan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah mencerminkan dinamika implementasi tata kelola publik di tingkat lokal yang berada di antara komitmen normatif kebijakan dan keterbatasan kapasitas institusional dalam praktik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diadopsi dalam kerangka kebijakan dan prosedur pelayanan, namun implementasinya masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai praktik pelayanan yang partisipatif dan kolaboratif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan good governance tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau program formal, tetapi juga oleh kapasitas institusi dan pola relasi antara birokrasi pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi pada literatur governance dengan menunjukkan bahwa implementasi good governance pada konteks pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah lebih tepat dipahami sebagai proses institusional yang dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, budaya birokrasi, dan posisi aktor pelaksana dalam praktik pelayanan publik. Dalam perspektif governance global, kasus Lampung Tengah memperlihatkan bahwa adopsi prinsip good governance pada tingkat kebijakan tidak selalu diikuti oleh transformasi substantif dalam praktik pelayanan. Temuan ini sekaligus memperkuat argumen dalam pendekatan participatory dan collaborative governance bahwa kualitas tata kelola publik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu membuka ruang deliberatif dan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam proses kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah tidak hanya merupakan persoalan desain kebijakan, tetapi juga persoalan kapasitas kelembagaan dan pola interaksi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan tata kelola pelayanan publik memerlukan pendekatan yang tidak hanya memperbaiki mekanisme administratif, tetapi juga mendorong transformasi praktik pelayanan menuju model tata kelola yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

IMPLIKASI PRAKTIS DAN TEORETIS

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar reflektif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola pelayanan pembinaan UMKM. Peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya melalui penyediaan program pembinaan atau pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan pola komunikasi pelayanan, serta perluasan ruang partisipasi pelaku UMKM dalam proses pelayanan. Pengembangan mekanisme pendampingan usaha yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi penting untuk memperluas akses informasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan pembinaan UMKM di tingkat daerah.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance pada tingkat pemerintahan daerah cenderung berkembang dalam bentuk procedural compliance governance, yaitu kondisi ketika prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diadopsi dalam kerangka kebijakan formal tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai praktik pelayanan yang substantif. Temuan ini memperkaya literatur governance dengan menegaskan bahwa keberhasilan good governance tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, budaya birokrasi, dan pola relasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami dinamika implementasi good governance pada konteks pelayanan publik di tingkat lokal di Indonesia.

REFERENCES

- Agma, Asty Raisha. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Daerah: Studi Pada Pemerintah Kota." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1(1):34-41.
- Andini, Andini. 2024. "Partisipasi Publik Dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar= Public Participation in the Implementation of the Micro Small Medium Enterprises Incubator Program at the Makassar City Cooperative and Small Medium Enterprises Service."
- Arifa, Isna, Ahmad Choiri, Wahyu Wibowo, Aminuddin Aminuddin, and Nur Azizah Panggabean. 2025. "Peran UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4(4):5376-85.
- Armansyah. 2024. "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10(01):75-85. doi: <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i1.287>.
- Astuti, Witri Puji. 2025. "Harmonizing Policy and Needs: Encouraging Autonomy of State Islamic Religious Universities for Responsive Student Admission Policies in the Regions." *AMUYA: INDONESIAN JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS* 1(2):315-36.
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, M. Munif Ridwan, and Bambang Susilo. 2018. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Ugm Press.

- Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. 2024. "Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9(3):195–203.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press.
- Elazhari, Elazhari, and Barham Siregar. 2025. "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Tingkat Lokal: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Sistem Merit." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 5(2):138–49.
- Embang, Eka Jaya Putra Hatika, Muhammad Hairul Saleh, and Muh Jamal. 2025. "Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance Pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10(3):483–504.
- Gaol, Lasando Lumban, Eli Budi Santoso, and Agus Prasetyo. 2024. "Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Informasi." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4(1):126–40.
- HARDI, HARDI, and ZAHARMAN ZAHARMAN. 2018. "Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Umkm Menghadapi MEA." *Jurnal Daya Saing* 4(1):36–47.
- Hidayat, Asep, Surya Lesmana, and Zahra Latifah. 2022. "Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(6):6707–14.
- Hutagalung, Gidion Steven. 2021. "Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)." *Jurnal Juristic* 2(1):99–115.
- Indah, Wijayanti. 2024. "PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA MELALUI UMKM OLAHAN MAKANAN RINGAN DI DESA PURWODADI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH."
- Kamindang, Irwansyah, Krispen Herbret Masu, Asrifai Asrifai, and Sitti Chaeriah Ahsan. 2025. "Good Governance Sebagai Meta Governance." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2(12):2197–2207.
- Kharisma, Bayu. 2014. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19(1):1–34.
- Lucianda, Lucianda. 2020. "Efektivitas Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu."
- Margaretha, Viona. 2025. "REFORMASI REGULASI UNTUK MEMPERMUDA PROSES BERUSAHADI INDONESIA." Pp. 17–35 in *SenHIB: Seminar Nasional Hukum dan Investasi Berkelanjutan*. Vol. 1.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Nurhayati, Neni. 2025. "Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kolaboratif: Integrasi Faktor-Faktor Kunci."

- Pigome, Yohanis, Yeheschiel Bartin Marewa, Liberthin Palullungan, and Elfran Bima Muttaqin. 2024. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NABIRE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASNYA."
- Prastika, Hamami Cahya. 2016. "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan."
- Putri, Euis Hasmita. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)." *EJournal Administrasi Negara* 5(1):5431-45.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)."
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini. 2022. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7(1).
- Saggaf, Said, Muhammad Mario Said, and Widiawati Said Saggaf. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media.
- Saputra, Irwan Ade, and Zarni Adia Purna. 2024. "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Pendekatan Debirokratisasi Untuk Pengembangan Umkm Di Kota Baubau." *Jurnal Administrasi Negara* 30(1):1-20.
- Saputra, Munir, and Erni Prasetyani. 2025. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Johar Baru: Hambatan Dan Strategi Peningkatan." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8(1):99-105.
- Simatupang, Patar, and Haedar Akib. 2011. "Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 2(1).
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, Marantika Fibrianti, and Ananta Prathama. 2021. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)'Handycraft' Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(5):2322.
- Suriadi, Hari. 2025. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia: Kajian Teoretis Atas Prinsip, Tantangan Dan Strategi Implementasi." *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan* 1(1):42-54.
- Ulfa, Santi Nofria, and Aldri Frinaldi. 2025. "INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK." *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5(2):610-21.
- Wilujeng, Wise. 2025. "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10(2):203-14.